



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 19 Maret 2021

Halaman: 2

UKM Diminta Urus Izin Usaha Mikro

UMBULHARJO (MERAPI)

Sekitar 25 persen pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) di Kota Yogyakarta belum memiliki Izin Usaha Mikro (IUM). Untuk itu Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta mendorong pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Yogyakarta segera memiliki IUM karena memberikan legalitas dan keuntungan.

"Kami perkirakan ada sekitar 25 persen pelaku usaha kecil mikro di Kota Yogyakarta yang belum memiliki izin usaha mikro," kata Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto, Kamis (18/3).

Berdasarkan data Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta hingga kini tercatat 16.422 UKM yang memiliki IUM. Jumlah tersebut berdasarkan pengajuan IUM melalui online single submission pada tahun 2019 hingga 2020.

Ia menyampaikan salah satu penyebab masih adanya pelaku UKM yang belum mengurus IUM karena tidak mengetahui cara pendaftarannya. Apalagi kini pendaftaran IUM dilakukan secara online atau daring dan banyak formulir yang harus diisi. Mengingat sebagian pelaku UKM ada yang gagap teknologi.

"Cukup banyak formulir yang harus diisi untuk mengurus izin usaha mikro

secara daring. Kadang pelaku UKM sulit memasukan data dan persyaratan yang harus dipenuhi," paparnya.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya akan melakukan diseminasi di masyarakat untuk mendorong pelaku UKM mengurus IUM. Menurutnya banyak keuntungan yang didapat dari kepemilikan IUM seperti meningkatkan status usaha dari informal menjadi formal, mendapat perlindungan hukum dan membangun jaringan usaha yang lebih luas. Dalam masa pandemi Covid-19 tahun 2020, ada program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) bagi pelaku UKM dengan mensyaratkan kepemilikan IUM.

iLewat diseminasi di wilayah terkait pengurusan IUM, harapannya semakin banyak pelaku usaha yang memiliki IUM, imbuh Tri Karyadi.

Diakui di masa pandemi Covid-19 tahun 2021, pemerintah pusat berencana kembali memberikan bantuan bagi pelaku UKM. Namun hingga kini, pemerintah daerah belum memperoleh informasi terkait penyaluran BPUM tahun 2021.

"Informasi sementara, pendaftaran akan difasilitasi atau diusulkan oleh dinas terkait di tingkat kota atau kabupaten. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai waktu pendaftarannya," ucapnya. (Tri)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005